

E-GOVERNMENT PADA PEKON PAGELARAN

Wahyu Bagus Wijanarko¹, Dedi Irawan²

Jurusan Sistem Informasi (STMIK) Pringsewu Lampung
Jl. Wismarini No.09 Pringsewu Lampung
Telp/Fax. (0729) 22240, website : www.stmikpringsewu.ac.id
Email: wbaguswijanarko325@gmail.com

ABSTRAK

Elektronik Government (e-Government) adalah istilah yang sangat populer saat ini, dimana secara umum e-Government adalah upaya mengaplikasikan pelayanan pemerintahan melalui sistem informasi berbasis komputer. Pekon Pagelaran merupakan desa yang berada di Kabupaten Pringsewu Lampung. Salah satu tujuan pembuatan e-government pada Pekon Pagelaran adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas agar lebih mengetahui tentang kegiatan pemerintahan, potensi desa, dan pelayanan pemerintahan secara online. Seringnya permintaan data tentang perangkat desa dan potensi desa oleh para pimpinan instansi pemerintahan yang lebih tinggi, yang dilakukan secara manual tidak menutup kemungkinan data-data yang disampaikan kurang akurat ataupun kurang cepat, lagipula adanya potensi-potensi desa yang belum optimal serta terjadinya perubahan data-data di desa perlu mendapatkan perhatian yang serius semua pihak. Oleh karena itu perlunya pembuatan e-government pada Pekon Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

Kata Kunci: *e-Government, Sistem Informasi, Pemerintahan Desa.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sektor pemerintahan turut memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya volume pekerjaan yang ada di sektor pemerintahan dan semakin menggiurkannya tawaran dari (TIK) menjanjikan suatu hasil yang efisien, produktif dan transparansi. Di suatu sisi untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik, yang diharapkan dapat menghasilkan layanan publik yang adil, transparan, efisien, dan manfaatnya dirasakan oleh semua warga masyarakat tanpa kecuali adalah merupakan salah satu tujuan pengembangan *E-gov (electronic government)* oleh pemerintah. Kebijakan pengembangan *E-gov* di Indonesia tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian secara teknis diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government Indonesia, dimana terdapat lima panduan yaitu : (1) Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah; (2) Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik; (3) Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Lembaga; (4) Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah; (5) Panduan tentang Pendidikan dan Pelatihan SDM *E-Government*.

E-Government itu sendiri adalah implementasi dari *E-governance* dalam damain pemerintahan. Dimana *E-governance* lebih dari sekedar *website* pada *internet*, melainkan mencakup

fungsi yang sangat luas, yang seringkali dikaitkan dengan *e-democracy* dan *egovernment* (Backus, 2011: 12). *E-Government* sudah banyak digunakan oleh desa-desa di Indonesia. Namun berbeda dengan Pekon Pagelaran yang belum menggunakan sistem ini.

Pekon Pegelaran dalam penyampaian informasi masih secara manual yaitu dengan menepel kertas informasi di papan pengumuman di Kantor Balai Pekon dan tempat-tempat umum seperti di pos ronda dan di umumkan di mushola atau masjid. Pekon Pagelaran belum menggunakan sistem *E-Government* dikarenakan sarana dan prasana yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan penyajian informasi masih secara manual. sehingga perlunya dibangun suatu sistem *E-Government* untuk menyajikan informasi mengenai potensi Pekon Pagelaran dan kegiatan pemerintahan di Pekon Pagelaran.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah mengkaji latar belakang yang telah diuraikan dapat diangkat suatu rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana rancang bangun *E-Government* pada Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu?
2. Bagaimana penerapan rancang bangun *E-Government* pada Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu?

1.3. Batasan Penelitian

Batasan masalah dari penelitian ini adalah hanya membahas rancang bangun *E-*

Government pada Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, adapun tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Terwujudnya sistem pemerintahan desa yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dalam penerapan *E-Government*.
2. Bagaimana mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi yang telah dibangun untuk mengolah data pemerintahan Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu sehingga dapat memperoleh hasil akhir berupa informasi yang akurat dan memadai, yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
3. Terwujudnya sistem administrasi pemerintahan desa guna memudahkan dalam manajemen kepegawaian pemerintah desa.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Manfaat teoritis: hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan wacana dan memperkaya kajian teori sistem informasi *E-Government* berbasis web.
2. Manfaat praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam memberikan arah yang tepat dalam menentukan sebuah kebijakan maupun keputusan karena didukung oleh informasi akurat dan cepat, khususnya di Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Sistem

Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berkaitan yang bertanggung jawab memproses masukan (*input*) sehingga menghasilkan keluaran (*output*) (Kusrini, 2013: 108). Suatu sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Pendekatan sistem merupakan suatu filsafat atau persepsi tentang struktur yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan atau operasi-operasi dalam suatu organisasi dengan cara yang efisien dan yang paling baik.

Enger (2014: 2) menyatakan bahwa suatu sistem terdiri atas suatu kegiatan yang berhubungan guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan seperti pengendalian inventaris atau penjadwalan produk. Sedangkan Atmosudirdjo (2013: 69) menyatakan bahwa suatu sistem terdiri atas komponen-komponen yang berhubungan satu sama lainnya, sehingga komponen tersebut

merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berkaitan yang bertanggung jawab memproses masukan (*input*) sehingga menghasilkan keluaran (*output*) dan terdiri atas suatu kegiatan yang berhubungan guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan seperti pengendalian inventaris atau penjadwalan produk, komponen-komponen yang berhubungan satu sama lainnya, sehingga komponen tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu.

2.2. Informasi

Menurut Jogiyanto, (2012:39). Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Informasi adalah data yang diproses dan data yang memiliki arti. (Raymond: 2012). Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berguna dan nyata atau berupa nilai yang mempunyai arti bagi penerima.

Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan suatu keputusan. (Kristanto dalam jurnal Wahyudi, S. 2012).

Informasi merupakan data yang diproses kemudian diolah menjadi informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

2.3. Definisi Sistem Informasi

Sistem Informasi dapat didefinisikan sebagai sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai tujuan yaitu penyajian informasi. (Leman: 2011: 13)

Menurut Leitch dan Davis (Dalam jurnal Indriyanto. M. W 2011). Mengatakan bahwa Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Menurut Sutabri (2012: 42), sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan

transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Dari beberapa definisi di atas maka disimpulkan bahwa sistem informasi adalah komponen-komponen data yang diproses yang digunakan dalam mencapai tujuan dari Anggun Jaya.

2.4. E-Government

Kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 2013:15). Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di wilayah perdesaan (Hardjatno, 2014)

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2013 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah-an desa adalah “kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang di-laksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan” (Wijaya, 2014).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggraan pemerintahan desa merupa-kan subsistem penyelenggaraan peme-rintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

E-Government, yang dapat didefinisikan sebagai seluruh tindakan dalam sektor publik (baik pusat maupun daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, transparan, dan efektif (Prasojo, 2013: 82), telah menjadi bagian penting dalam usaha untuk membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Pentingnya *E-Government* paling tidak disebabkan oleh 3 (tiga) faktor (Prasojo, 2013: 82), yaitu:

- (a) Komunikasi elektronik antara sektor publik dan masyarakat menawarkan bagi keduanya bentuk baru untuk partisipasi dan interaksi;
- (b) Ruang *cyber* dalam pelayanan public memudahkan penghapusan struktur birokrasi dan proses klasik dari pelayanan yang berbelit-belit; dan

(c) *E-Government* dapat menawarkan juga informasi di tingkat lokal.

2.7. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2013 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah “kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan” (Wijaya, 2014: 19). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

2.8. Pekon Pagelaran Kecamatan Pagelaran

Pekon Pagelaran merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Pringsewu. Pekon Pagelaran sebelah barat berbatasan dengan Pekon Pujiharjo sebelah utara berbatasan dengan Pekon Pasir Ukir sebelah selatan Pekon Gemahripah dan sebelah timur berbatasan dengan Pekon Patoman dan Pekon Panutan.

Penduduk pekon Pagelaran mayoritas penduduknya petani sawah dan petani perikanan. Hasil perikanan Pekon Pagelaran sangat terkenal di wilayah Kabupaten Pringsewu. Sarana dan Prasarana di Pekon Pagelaran antara lain terdapat 3 Masjid, 2 Taman Kanak-kanak dan 2 PAUD, 4 Sekolah Dasar, 13 Mushola. Letak Pekon Pagelaran sendiri berjarak sekitar 35 km atau kurang lebih satu jam perjalanan dari kota Bandar Lampung ke arah barat. Mayoritas penduduk Pagelaran beretnik Lampung, Jawa, Jaseng (Jawa Serang) (kaum transmigrasi pada tahun awal-awal kemerdekaan). Sebagian besar penduduk bermata pencaharian bertani, pemeliharaan budidaya ikan. Pekon Pagelaran sendiri terkenal dengan hasil perikanan seperti ikan mas, ikan lele dan ikan gurame. Pekon Pagelaran terdiri dari empat dusun dan 15 RT.

2.9. E-Government pada Pekon Pagelaran

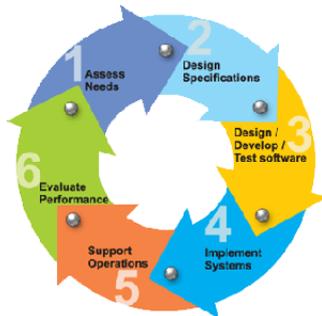
E-Government pada pekon Pagelaran merupakan sistem yang digunakan untuk menyajikan informasi mengenai Pekon Pagelaran. Sistem ini juga menyajikan informasi mengenai potensi yang ada di Pekon Pagelaran. Dengan adanya sistem ini memudahkan masyarakat maupun orang lain mengakses

informasi tentang Pekon Pagelaran. Sehingga informasi mengenai desa dapat menyebar luas ke seluruh penjuru Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Dari definisi di atas, maka penulis mengambil *Metode Sistem Development Life Cycle (SDLC)* yang berfokus pada metode sistem E-Government serta teknisi yang digunakan dalam membangun sebuah sistem. Tahapan-tahapan *Sistem Development Life Cycle* dalam sebuah *E-Government* pada Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu.



Gambar 3.1. Metode SDLC

1. Planning

Pada tahap ini penulis membuat perencanaan dengan mengumpulkan bahan serta study kelayakan kebutuhan aplikasi *E-Government* pada Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu.

2. Analisa

Pada tahap ini penulis menganalisa seluruh kebutuhan sistem untuk usulan sistem aplikasi. Dengan menetapkan kemampuan yang diperlukan untuk kebutuhan informasi pengguna akhir, yang berguna untuk menyelesaikan tahap sistem informasi Pekon Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kab. Pringsewu.

3. Desain

Tahap ini dimodelkan informasi link dari setiap halaman, jika dalam sistem tersebut terdapat database maka digunakan tahap *development* dan *database desain*.

4. Implementasi

Penulisan program dan instalasi. Tahap penulisan program yang telah dianalisis dan didesain semua maka program yang digunakan adalah MySQL.

5. Pemeliharaan Sistem

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh penulis yaitu:

- Memperbaiki desain yang error pada program aplikasi *E-Government*.
- Kemudian memodifikasi sistem untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
- Melibatkan sistem untuk menyelesaikan masalah baru.

- Menjaga sistem dari kemungkinan masalah di masa yang akan datang.

3.2. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara peneliti dengan informan. Peneliti disini yang berharap mendapatkan informasi, sedangkan informan adalah seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu obyek, Wawancara dilakukan langsung kepada para pegawai pemerintahan pekan.

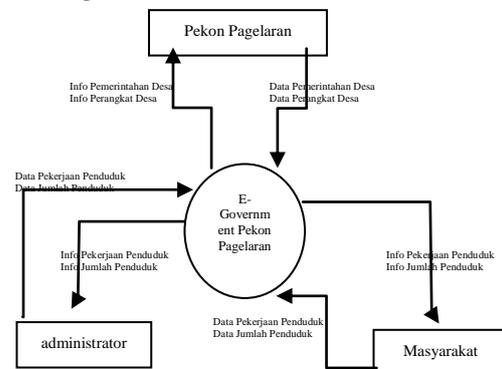
b. Metode Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari referensi berupa dokumen/berkas dan mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal penelitian dsb, melalui studi pustaka dilakukan kajian terhadap peraturan-peraturan perundangan yang terkait pengelolaan potensi daerah. Kebutuhan data-data yang mengungkapkan tentang indikator-indikator yang digunakan oleh calon investor untuk pengambilan keputusan investasi diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku-buku dan jurnal penelitian. Studi pustaka juga dilakukan untuk mengetahui kemampuan teknologi informasi yang akan diterapkan dalam sistem.

c. Metode Observasi

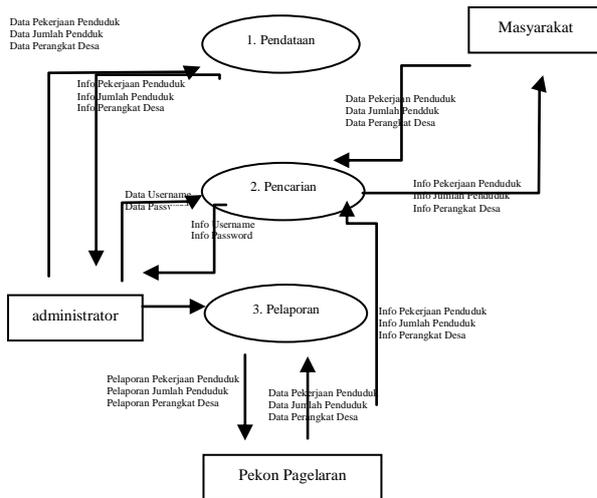
Metode observasi merupakan metode penelitian dimana, peneliti melakukan pengamatan/melihat dan meneliti langsung ke obyek penelitian tentang seluruh aktifitas yang berhubungan dengan maksud penelitian, Dengan menganalisa mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dan memberikan solusi melalui sistem informasi yang akan dibangun sehingga dapat lebih bermanfaat.

3.3. Diagram Konteks



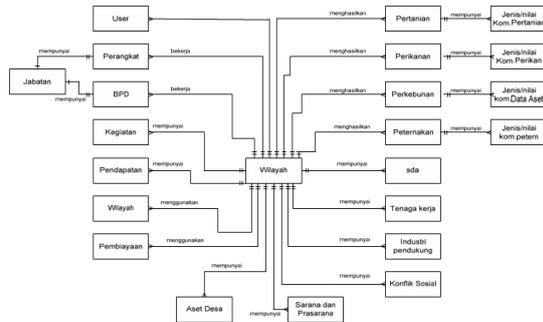
Gambar 3.2. Diagram Konteks

3.3.1. Diagram DFD



Gambar 3.3. Diagram DFD

3.3.2. Diagram ER



Gambar 3.4. Diagram ER

4.1.2 Implementasi Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan *E-Government* Pekon Pagelaran dapat dilihat pada tabel 4.

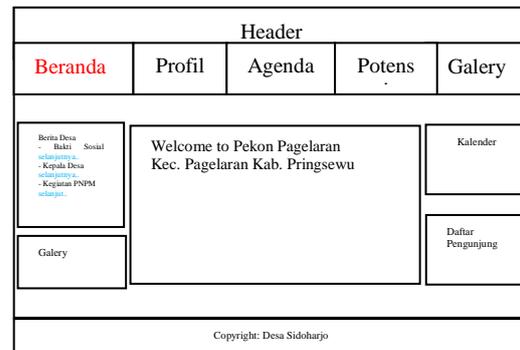
Tabel 4.2 Perangkat Lunak yang digunakan

Perangkat Lunak	Keterangan
Sistem Operasi	Windows XP Professional SP III
Bahasa Pemograman	PHP 5.2.6
Web Server	XAMPP version 2.3
Database Server	MySQL 5.0.51b
Web Browser	Mozilla firefox 4.0 Beta 2
Code Editor	Macromedia dreamweaver 8

4.1.3 Rancangan Halaman Website

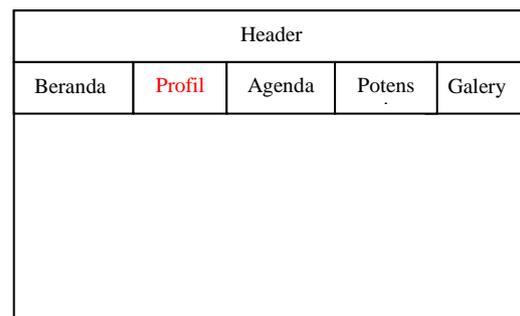
Rancangan Halaman beranda adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Tampilan Halaman Beranda



Gambar 4.1. Halaman Beranda

b. Rancangan Tampilan Profil



Gambar 4.2 Rancangan Tampilan Profil

4. HASIL DAN IMPLEMENTASI

4.1 Implementasi

Tahap implementasi dilakukan setelah melakukan tahap analisis perancangan pada sistem.

4.1.1. Implementasi Perangkat Keras

Perangkat keras yang diperlukan untuk mengimplementasikan perangkat lunak dari *E-Government* Pekon Pagelaran dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.1. Perangkat Keras

Perangkat	Server	Client
Processor	Kecepatan 800	Kecepatan
RAM	1 GHz	512 MHz
Harddisk	80 Gb	80 Gb
Monitor	Resolusi 1024 x 768	Resolusi 1024 x 768
VGA	128 Mb	128 Mb
Lan Card	10/100 Mbps	10/100 Mbps

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian rekayasa pembangunan aplikasi *Electronic Government* untuk pemberdayaan pemerintahan dan potensi desa berbasis web di Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. E-Government pada Pekon Pagelaran dirancang dengan menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan MySQL.
2. Dengan adanya E-Government pada Pekon Pagelaran memudahkan dalam penyajian informasi penduduk, potensi desa.

5.2. Saran

Dari uraian di atas penulis memberikan saran antara lain:

1. Dengan adanya E-Government pada Pekon Pagelaran hendaknya sistem yang ada dapat dikembangkan lagi dengan berbasis mobile.
2. *E-Government* pada Pekon Pagelaran agar dapat dikembangkan lagi ke basis pelayanan secara online, sehingga memudahkan petugas desa dan dapat memberikan layanan yang cepat kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prajudi. 2012. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan implementasi*. CSIS: Jakarta.
- Backus, Michiel. 2011. *Kebijakan Politik Electronic Government, Pelayanan Publik atau Kepentingan Politis? (Studi Deskriptif Implementasi E-KTP di Kota Surabaya)*. Surabaya
- Hardjatno. 2014. *Potensi Desa*. Jakarta: Lemhannas.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 *tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government Indonesia*. Jakarta
- Jogiyanto. 2012. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kristanto. 2012. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Gava Madia: Klaten.
- Kusrini. 2013. *Sistem Informasi Pemerintahan*. Jakarta
- Leitch dan Davis dalam jurna Indriyanto. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat dan Potensi Desa*. Bandung
- Leman. 2011. *Analisis dan Perancangan Sistem, Edisi kelima jilid 1*. Yogyakarta
- Norma L. Enger. 2014. *Management Informatika System*, 6th Ed. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Prasojo. 2013. *Pemerintahan Desa*. Bandung
- Raymond. 2012. *E-Government dalam Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta
- UU No. 11 Tahun 2008. *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2013. *Pemerintahan Desa*. Jakarta

Soetardjo. 2013. *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia vol. 5 dan 6*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Wijaya. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bappenas